

Volume 19, Nomor 2, September 2015

ISSN : 1410-3133



# Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ka. DEWAN REDAKSI

Harmiyati

PENYUNTING AHLI

Anik Yuniarti

M. Edy Susilo

Didik Indarwanta

BENDAHARA

Sugiarto

SEKRETARIS

Ida Wiendijarti

SIRKULASI dan DISTRIBUSI

Yuli Putranto

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Jl. Babarsari No. 2 Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 485268, 486991  
Fax. (0274) 487147

Paradigma diterbitkan dua kali dalam satu tahun sebagai media informasi karya ilmiah untuk bidang kajian sosial dan politik serta masalah-masalah yang menyangkut faktor penyebab, implikasi maupun analisis menyeluruh kebijakan baik di sektor pemerintah maupun swasta

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitian dan resensi buku.

Redaksi berhak untuk menyunting isi naskah tanpa mengubah substansi.

# Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

3133

## DAFTAR ISI

1-10

**Kebijakan Pemerintah Vietnam dalam Mengatasi Emisi Gas Rumah kaca**

*Prima Nurita Nungky Astari dan Muharjono*

11-18

**Model Pengembangan Agroindustri di Desa Gondangan Kecamatan Jogonalan Klaten**

*Didik Indarwanta, Ida Susi Dewanti, dan Asih Marini Wulandari*

19-30

**Minoritas Islam dalam Politik di Amerika Latin**

*Hikmatul Akbar dan Kartina Dwi Aprilia*

31-38

**The Role of South Korea's Government in Developing and Sustaining Hallyu**

*Reza Prima Yanti*

39-55

**Perpanjangan Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat pada Tahun 2013**

*Elli Listiana dan Erna Kurniawati*

56-71

**Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Dominasi Partai AKP dalam Pemilu Legislatif Turki tahun 2015**

*Frederikus Nong Wair dan Harmiyati*

72-81

**Dampak Agreement on Agriculture terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Komoditas Gula (2009-2014)**

*Dimitria Ariesta Pramoto, Asep Saepudin, dan Anik Yuniarti*

82-92

**Respon Indonesia Terhadap Klaim Cina Atas Wilayah Kepulauan Natuna Kabupaten Kepulauan Riau**

*Ratnawati*

nplikasi

## RESPON INDONESIA TERHADAP KLAIM CINA ATAS WILAYAH KEPULAUAN NATUNA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

Ratnawati

Prodi Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. Babarsari No. 2, Tambakbayan, Yogyakarta

Email: ratnawatiraharjo@yahoo.com

### *Abstract*

*In November 2015, the Indonesian nation was shocked by the China claim to ownership Kabupaten Natuna of Natuna Islands in Riau province of Indonesia. China claims raises tensions between the two countries shortly and he completed well so it does not interfere with relations between Indonesia - China. This article will be studied for what reason China claims territory that rightfully belongs Indonesian into its territory and how the Indonesia government's response to this problem.*

*Key words: claim, territory, Indonesia, China.*

### **Pendahuluan**

Pada akhir bulan Oktober 2015 yang lalu, Pemerintahan Indonesia dikejutkan dengan klaim Cina atas Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau. Peristiwa ini langsung mendapatkan respon dari pemerintahan Indonesia disebabkan Cina tidak mempunyai dasar atas klaim tersebut, yang secara sah Kepulauan tersebut milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan pengklaim Cina atas wilayah Indonesia tersebut sangat menarik untuk dikaji karena masalah ini secara tidak langsung akan melibatkan Indonesia ke dalam sengketa Laut Cina Selatan yang selalu menghangat terus semenjak Cina pada tahun 2009 secara sepihak menyatakan bahwa sebagian besar wilayah di Lautan Cina Selatan yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam serta Taiwan dimasukkan ke dalam peta Cina, dan hal ini mendapatkan reaksi keras dari Negara-negara tersebut dan posisi wilayah Indonesia yang juga berdekatan

dengan wilayah yang dikalim Cina tersebut tidak termasuk wilayah yang dimasukkan peta Cina.

Namun dengan adanya Kalim terbaru Cina yang menyatakan bahwa wilayah Kepulauan Natuna masuk wilayah Cina, Indonesia merasa terganggu karena Cina telah menyatakan secara sepihak dengan memasukkan sebagian dari Kepulauan Natuna dalam sembilan garis terputus tersebut, yang berarti menyatakan sebagian dari Provinsi Kepulauan Riau masuk ke wilayahnya. Garis terputus tersebut terihat di paspor Warga Negara Cina yang baru diterbitkan. Kepulauan yang termasuk di sini terletak di pesisir barat laut Kalimantan.

Peristiwa Klaim Cina atas Kepulauan Natuna di atas memang sangat menarik untuk dicermati walaupun peristiwa ini sudah dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan baik, namun dalam tulisan ini akan menganalisa dua pertanyaan mengapa Cina nekad menyatakan bahwa Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan

Riau menjadi bagian wilayah Cina dan bagaimana Indonesia merespon klaim tersebut sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam menganalisa masalah yang akan dikaji akan digunakan teori kepentingan nasional (national Interest) bagi negara yang terlibat (Hans J. Morgenthau: 1998. 40), untuk menjawab pertanyaan pertama, inti dari teori ini bahwa politik luar negeri suatu Negara tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan kedua akan digunakan teori tentang diplomasi ( Chrisster Jonsson & Martin Hall.: 2006, 35) Inti dari teori ini bahwa salah satu penyelesaian pertikaian internasional selalu diupayakan dengan cara berdiplomasi.

#### Latar Belakang Klaim Kepulauan Natuna

Saat ini banyak terjadi kegaduhan terkait konflik Laut China Selatan, salah satu kegaduhan yang tidak berdasar antara lain bahwa Kepulauan Natuna milik Indonesia diklaim masuk peta wilayah China. Tentu klaim tersebut menimbulkan banyak reaksi dari para pengamat politik Internasional, Pengamat Intelejen, Hukum Internasional, bahkan pakar Hukum Tata Negara karena Klaim Cina tersebut tidak mendasar sama sekali. "Pernyataan ini sangat tidak berdasar karena dalam klaim China dalam konflik Laut China Selatan yang disampaikan ke Sekjen PBB pada 2009, Cina sama sekali tidak bisa mengklaim Kepulauan Natuna, sebab jarak kepulauan Natuna dengan Pulau Spratley lebih dari 400 Mil Laut atau dua kali luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ungkap Nuning, sebagai pengamat intelejen kepada Okezone, Kamis (kompas. Com :19/11/2015). Nuning menegaskan, gambar garis-garis putus di Laut China Selatan dalam paspor warga Cina bukan suatu bukti hukum kepemilikan yang kuat dalam

hukum internasional.

"Sesungguhnya Pemberitaan media dan pernyataan pejabat yang simpang siur tentang Laut Cina Selatan telah membuat kegaduhan yang tidak perlu. Banyak para pengamat politik Internasional menyatakan bahwa tidak ada satu pun negara yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau Indonesia di Natuna." Seperti yang dikatakan oleh Hikmahanto Juwono sebagai pakar Hukum Internasional juga menjelaskan, dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau di Natuna sangat kuat, yakni ada di balik sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada 1958. Berdasarkan hal tersebut kemudian, Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat atas kepemilikan Kepulauan Natuna. Selain itu, pengamat Intelejen Nuning juga menuturkan bahwa "Kemudian, Pulau Natuna masuk wilayah Indonesia juga diakui oleh (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan telah didepositkan di Sekjen PBB tanpa ada protes satu negara pun." , Okezone (*online*) 15 Desember 2015). Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah berhati-hati dan menelaah bahasa diplomatik Cina. Terutama dalam kaitannya dengan klaim atas Kepulauan Natuna. Menurut dia, Cina bisa saja mengatakan tak pernah mengklaim Natuna. Tetapi, peta resmi yang disiarkan pemerintah Cina menunjukkan sebaliknya." Hati2 dengan bahasa diplomatik Kementerian Luar Negeri Cina. Mereka memang bilang tidak klaim Pulau Natuna. Tapi peta resmi yg disiarkan pemerintah china memasukkan perairan Natuna ke dalam wilayah laut mereka," kata Yusril dalam akun twitter pribadinya, @YusrilIhza\_Mhd yang dikutip Republika pada Sabtu (Republika online, 21 November 2015 21/11)

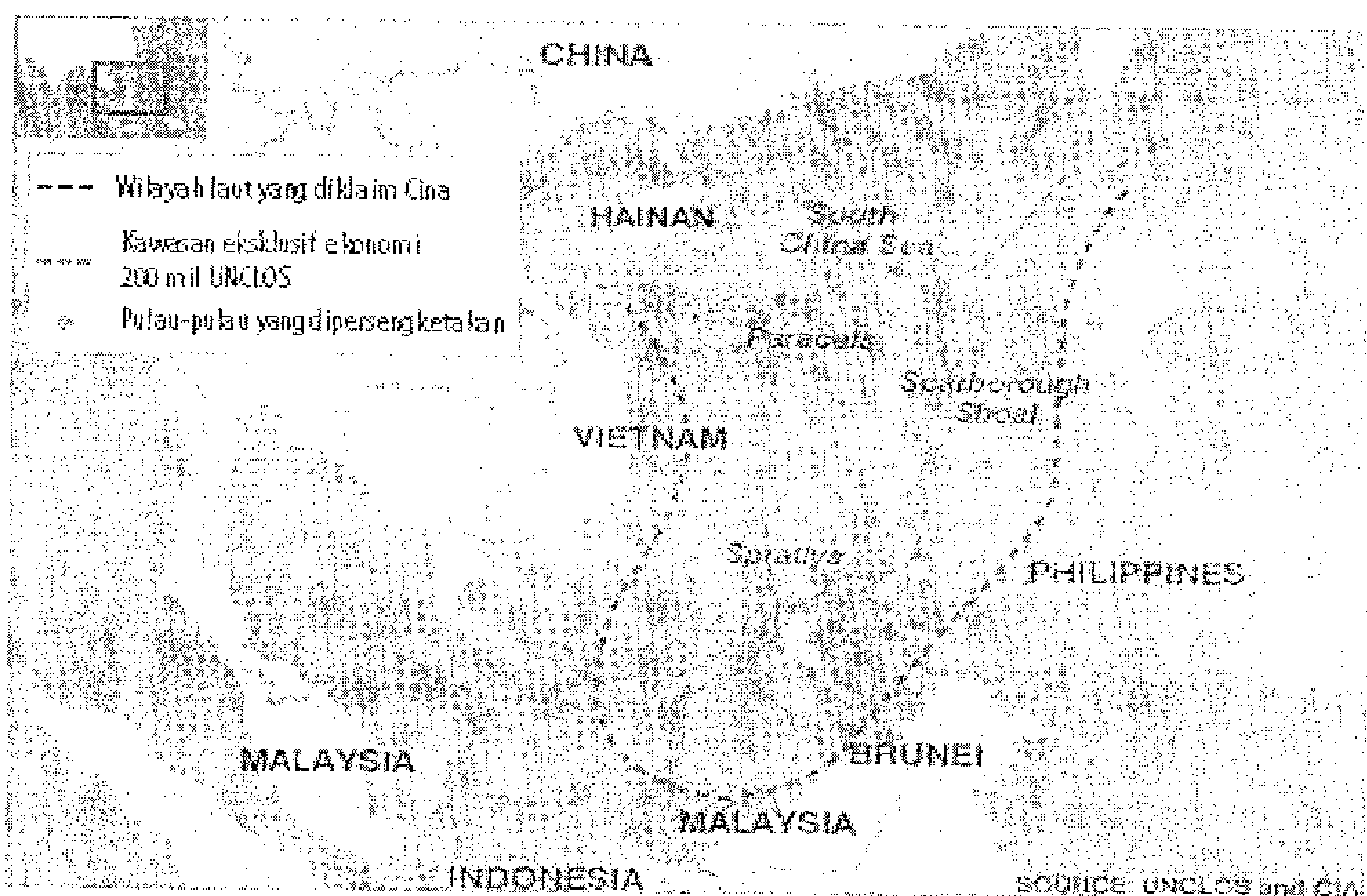
Dalam peta tersebut, lanjut Yusril, Pulau Natuna terletak di dalam wilayah laut yang

diklaim milik cina."Ini bertentangan dengan UNCLOS .Apa anda paham masalah ini? Apa Menlu Retno Marsudi tidak paham bahasa diplomatik dan UNCLOS?" tegasnya.Kalau Cina berhasil mengklaim laut tersebut sebagai teritorialnya, maka mengambil Pulau Natuna tinggal selangkah lagi.Yustril pun mengkritisi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang merespons pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina.Menurutnya, respon Menlu RI adalah sikap yang kurang bijak."Jubir Kemlu Cina itu kalau adalah pejabat eselon II yang tidak bisa dijadikan pegangan.Statemen Jubir Deplu itu setiap saat bisa dibantah atau"diluruskan" oleh dirjen dan Menlu Cina. Coba tanya Bu Retno apa pernah Menlu China atau Presiden Cina membantah klaim mrk atas natuna?" katanya (Republika online, 21 November 2015)

Kalau melihat ke belakang mengapa Cina mengklaim wilayah Kepulauan Natuna masuk

peta dari Cina dapat dicermati sebagai berikut. Kalau melihat pada kenyataan bahwa Klaim Cina atas Laut Cina Selatan tidak terlepas dari kepentingan nasional Cina, perlu dipahami bahwa pada saat ini Cina yang masih meneruskan proyek reklamasi di pulau yang berada di salah satu titik di Laut Cina Selatan memicu ketegangan dengan beberapa negara. Pekerjaan proyek ini jelas mengganggu beberapa Negara yang ada di Laut Cina Selatan seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Pilifina.Landasan terbang dan fasilitas komunikasi terus dibangun dan diyakini banyak pihak akan dipakai sebagai Pangkalan Militer. Proyek itu dijalankan beriringan dengan dirilisnya peta yang disebut dengan "sembilan garis putus-putus".Berdasar peta yang menjadi pangkal sengketa itu, Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan merupakan wilayah mereka. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna.

### Peta Wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim Cina



Sumber: BBC Indonesia

Selain adanya pekerjaan mega proyek yang sekarang sedang dilakukan oleh Cina, banyak pula beberapa pihak yang mengkaitkan dengan muncul selentingan bahwa warga Cina dahulu yang masih bertahan di Kepulauan Natuna menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada dekade 80-an. "Ada permintaan kepada Deng agar Cina mendukung Kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni mayoritas Cina, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah administrasi Cina." Keinginan warga Cina yang bermukim di Natuna ini tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Yang jelas, Cina secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. "Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Cina dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun," ujarnya saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun (Merdeka.Com 15 Desember 2015).

Kalau melihat peta Konflik di Laut Cina Selatan setelah Cina menerbitkan peta baru wilayah Cina pada tahun 2009 dapat dilihat beberapa kepentingan Negara-negara yang terlibat sebagai berikut:

- Cina, Vietnam, dan Taiwan menuntut kedaulatan atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Spratly dan Paracel.
- Filipina, Malaysia, dan Brunei juga mengklaim sebagian wilayah yang saling tumpang tindih.
- Kepulauan Spratly diperkirakan kaya akan kandungan minyak maupun gas dan juga berada di jalur pelayaran penting.
- Cina memperkirakan cadangan minyak di kawasan itu mencapai 213 miliar barel walau perkiraan Amerika Serikat jauh lebih rendah, 28 miliar barel.

- Perkiraan kasar kandungan gas sekitar 25 triliun m<sup>3</sup> atau sama dengan cadangan gas yang dimiliki Qatar.

- Salah satu pulau di Kepulauan Spratly, Thitu, dihuni oleh sekitar 60 penduduk sipil Filipina dan memiliki jalur pendaratan pesawat. (BBC *(online)* :15 Desember 2015)

Alasan utama sengketa perebutan wilayah Laut Cina Selatan adalah kandungan gas alam dan minyak buminya. Cina menerbitkan estimasi tertinggi, menyatakan Paracel dan Spratly mungkin mengandung 213 miliar barel minyak bumi. Angka ini sekitar tujuh kali lipat perkiraan para peneliti Amerika Serikat. Gas alamnya pun melimpah. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, Laut Cina Selatan memiliki sekitar 25 triliun meter kubik gas alam, sama besar dengan cadangan gas alam Qatar. Belum lagi kekayaan ekosistem perairannya. Selain itu, lebih dari 50 persen perdagangan dunia melewati Laut Cina Selatan. Lokasinya pun strategis untuk pos pertahanan militer.

Akhir Februari 2015 yang lalu, Filipina mengundang perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi melalui eksplorasi minyak bumi di lepas pantai Laut Cina Selatan. Izin eksplorasi direncanakan diberikan kepada 15 blok, tiga di antaranya ada di wilayah sengketa. Cina menyatakan tindakan Filipina tersebut ilegal karena tanpa izin mereka. Urusan tuduh-menuduh bukan hal baru dalam sejarah sengketa Laut Cina Selatan. Tahun lalu Filipina menuduh Cina masuk tanpa izin ke wilayah perairannya dan mencoba mengganggu sebuah eksplorasi minyak bumi lepas pantai di dekat Pulau Palawan. Filipina juga menuduh Cina mencoba membangun pertahanan militer di Spratly. Vietnam juga pernah menuduh Cina mencoba menyabotase dua operasi eksplorasi Vietnam. Tuduhan ini memicu protes anti-Cina di jalan-jalan di Hanoi dan Ho

Chi Minh. Sebaliknya, Cina menuduh Vietnam memprovokasinya karena pernah melakukan latihan menembak di salah satu pesisir. Cina berusaha bernegosiasi dengan negara-negara lain yang menginginkan kedaulatan di Laut Cina Selatan. Namun Cina cenderung ingin bersepakat di belakang layar, yang kemudian ditentang pihak seberang meja dengan membawa isu ini ke mediasi internasional.

Salah satu hasil mediasi internasional adalah Konvensi PBB tahun 1982 yang mencantumkan kesepakatan berisi kerangka solusi. Saat dipraktikkan, konvensi itu malah memicu salip-menyalip pengakuan kedaulatan. Konvensi itu juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap klaim historis Cina dan Vietnam atas Paracel dan Spratly. Pada 4 November 2002, ASEAN dan Cina juga mendeklarasikan kesepakatan kode etik, salah satunya menyelesaikan sengketa tanpa ancaman atau penggunaan senjata. Filipina dan Vietnam juga telah mempunyai perjanjian bilateral dengan Cina, namun perjanjian itu hampir tidak berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Selain keenam negara yang bersengketa, Amerika Serikat juga punya kepentingan di laut tersebut. Kepentingan ini berhubungan dengan fakta Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran lebih dari setengah perdagangan dunia. Ada pula kepentingan militer, sehingga tak heran Amerika Serikat menempatkan pos militernya di sana. Walau menyatakan akan bersikap netral, ternyata Paman Sam memberikan bantuan militer kepada sekutu lamanya, Filipina. . (BBC (online) :15 Desember 2015)

Klaim Cina sepihak pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan adalah milik Cina membuat Laut Cina Selatan telah menjadi fokus dari sengketa maritim di Asia. Dua dari negara penuntut adalah

Cina dan Taiwan, sementara empat lainnya – Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam – adalah anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Meskipun ASEAN sendiri sebagai organisasi bukan salah satu pihak yang bersengketa, organisasi ini memiliki kepentingan agar sengketa di kawasannya diselesaikan dengan damai tanpa memengaruhi kebebasan navigasi internasional.

Indonesia juga memiliki posisi yang sama. Indonesia bukan pihak yang menuntut dalam sengketa ini, namun negara Indonesia akan terkena imbas jika terjadi konflik di Laut Cina Selatan karena interpretasi dari “nine-dash line” atau sembilan garis terputus di peta Cina, yang mengklaim sekitar 90% dari perairan yang luasnya 3,5 juta kilometer persegi (atau 1,35 juta mil persegi). Karena kepentingan strategis dan ekonomis dari perairan tersebut, maka isu ini telah menjadi permasalahan internasional yang juga melibatkan Amerika Serikat. Wall Street Journal (*online*), 16 Desember 2015)

### **Respon Indonesia atas Klaim Cina terhadap Kepulauan Natuna**

Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa Klaim Cina atas Kepulauan Natuna mendapatkan reaksi dari Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, persoalan klaim Kepulauan Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar kepulauan yang berpotensi tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan oleh Cina. “Permasalahan bukan pada klaim kepulauannya, tetapi di perairan sekitar Kepulauan Natuna,” kata Hikmahanto saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 November 2015 Tempo (*online*), 15 Desember 2015.

Pemerintah Indonesia masih mengutamakan jalur dialog dalam menyikapi

perselisihan klaim wilayah di Laut Cina Selatan oleh Cina. Pengoperasian tujuh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) di perairan Natuna ditegaskan tidak terkait dengan memanasnya situasi di sana. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menegaskan, hubungan Indonesia dengan Cina masih harmonis sejauh ini. "Ada apa memang di Natuna? Kemarin saya bertemu panglima atau KSAL Cina baik-baik saja," ujarnya di sela-sela HUT Ke-70 Marinir di Lapangan Apel Kesatrian Marinir Hartono, Cilindak, Jakarta, kemarin (15/11). KASAL RI menerangkan, pengoperasian tujuh KRI sebatas patroli yang merupakan salah satu rutinitas jajarannya. Karena itu, imbuh dia, hal tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan isu seputar klaim wilayah oleh Tiongkok. Selain Indonesia, zona ekonomi eksklusif beberapa negara lain juga masuk di peta tersebut. Mereka adalah Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Khusus Filipina, salah satu negara di ASEAN itu bahkan telah mengadukan Tiongkok ke Mahkamah Internasional.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam pusaran konflik di Laut Cina Selatan. Ryamizard menegaskan, posisi Indonesia di kawasan tersebut justru menjadi mediator. "Cina bilang Laut Cina terbuka, halaman kita bersama," ungkap Ryamizard di kantornya Jumat lalu (13/11). Menyikapi ketegangan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hanya menyampaikan harapan agar situasi yang ada tidak sampai mengganggu jalur perdagangan di kawasan itu. "Indonesia menjamin Laut China Selatan sebagai perairan yang bebas untuk perdagangan," ucap JK di Jakarta Sabtu (14/11) (Jpm (online 15 Desember 2015)

Pemerintah Indonesia di era Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB. Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut Cina Selatan. Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.

Cina sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly. Lima tahun terakhir, PBB belum bersikap atas protes dari pemerintah Indonesia. China juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing- Jakarta relatif adem ayem.

Tapi, sejak jauh-jauh hari TNI sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu personel TNI dikerahkan menjaga perairan dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996. Setelah berkuasa, Presiden Jokowi hendak menegaskan sikap terhadap Natuna, lebih keras dari sikap SBY. "Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Cina dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun," ujarnya saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun (merdeka.com : 15 Desember 2015).

Untuk mengatasi masalah klaim Cina atas wilayah Kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia melakukan Diplomasi Bilateral dengan membawa data yang lengkap sebagai buktik pemilikan Kepulauan Natuna sah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu RI dapat meyakinkan pemimpin Cina bahwa Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. Keberhasilan Indonesia melakukan diplomasi dibuktikan



dengan pernyataan Pemerintah Cina akhirnya menyatakan secara resmi mengakui hak penuh Indonesia atas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Wilayah ini telah memicu ketegangan sejak beberapa waktu, ketika Cina mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief Reef dan Pulau Subi sebagai bagian Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Kepulauan Natuna, yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan dan ujung selatan Vietnam, memiliki sekitar 270 pulau yang menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau Indonesia dengan 70 ribu penduduk.

Pada 12 November 2015, Cina mengejutkan negara-negara di kawasan itu dengan mengeluarkan pernyataan publik mengenai Kepulauan Natuna. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial ke hina atas Kepulauan Spratly. "Pihak Cina tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna," kata Hong Lei seperti dikutip Washington Times kemarin, Jumat 20 November 2015.

Pernyataan Cina ini penting meskipun Kepulauan Natuna berada di luar garis klaim Cina dalam Nine Dash Line yang mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dalam garis tersebut. Ini berarti ada pengakuan Cina terhadap legitimasi Indonesia atas ZEE yang berada dalam garis imajiner wilayah yang diklaim Cina. Pernyataan Cina ini cukup mengagetkan karena Cina selama ini tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada negara-negara yang menantang klaim maritimnya di Laut Cina Selatan. Kegagalan pemerintah Cina mengklarifikasi klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna dan ZEE terletak pada akar kecemasan yang dirasakan oleh Jakarta selama beberapa dekade terakhir.

Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar ASEAN bersama empat negara ASEAN lain (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei) membantah klaim maritim Cina.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan mereka menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Akan tetapi, pemerintah Cina sengaja menghindari diskusi publik terkait isu ZEE, yang memicu keraguan pemerintah Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat Cina menggunakan strategi Fabian kepada Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap. Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu pemerintah Cina terkait ZEE. Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tetapi juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi konflik dan melibatkan angkatan laut dari beberapa negara di dunia (Tempo, Com 15 Desember 2015).

#### **Kesimpulan:**

Klaim Cina atas Kepulauan Natuna tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional Cina atas kekayaan yang ada di sekitar Kepulauan Natuna. Memang masalah ini dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur diplomasi namun klaim Cina tersebut dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi pemerintahan Indonesia. Bisa saja Cina berharap dengan mengklaim wilayah Kepulauan Natuna masuk wilayah Cina, tidak akan mendapatkan reaksi yang keras dari Indonesia sehingga Cina dengan leluasa menguasai wilayah Kepulauan Natuna yang

secara resmi sudah masuk ke dalam peta yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peristiwa ini kemudian langsung mendapatkan respon dari pemerintahan Indonesia disebabkan Cina tidak mempunyai dasar atas klaim tersebut, yang secara sah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upayanya merespon klaim dari Cina terhadap Kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia sendiri melakukan berbagai cara misalnya melalui negosiasi dan diplomasi. Pemerintah Indonesia mengutamakan jalur dialog dalam menyikapi perselisihan klaim wilayah di Laut Cina Selatan oleh Cina.

Pada dasarnya, dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau di Natuna ini sudah cukup kuat. Hal ini terkait dengan sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada tahun 1958. Berdasarkan hal tersebut kemudian, Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat atas kepemilikan Kepulauan Natuna. Lebih jauh lagi, dialog dan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat dikatakan berhasil, mengingat dapat terselesaikannya masalah ini dengan Cina. Cina kemudian mengakui bahwa Kepulauan Natuna adalah merupakan bagian dari wilayah Indonesia, dan bukan bagian dari wilayah Cina.

Diplomasi merupakan jalur yang sangat tepat atas penyelesaian klaim Cina pada Kepulauan Natuna karena dalam waktu singkat Cina mengakui bahwa Kepulauan Natuna milik sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ke depan Indonesia harus membentangkan perhatian yang khusus pada konflik di Laut Cina Selatan karena konflik ini memiliki dinamika yang sangat tinggi yang dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik tersebut. Selain itu, dengan adanya klaim Cina di atas yang dapat diselesaikan secara diplomasi, pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah perbatasan yang belum

dapat diselesaikan dengan beberapa Negara tetangga secara baik. Selain itu, pemerintah diharuskan meningkatkan peranan Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP) di daerah perbatasan Indonesia di Kepulauan Natuna dengan pembangunan infrastruktur serta mengirimkan sebanyak mungkin transmigrasi ke wilayah ini. Usaha ini penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal:

Hong, Zhao, *The South China Sea Dispute and China-ASEAN Relations*, Asian Affairs, 2013.

Jonsson, Chrisster & Martin Hall, *Essence of Diplomacy: Studies in Diplomacy and International Relations*, Palgrave Macmillan, 2005.

Johnson, Douglas, *Drawn into the Fray: Indonesia's Natuna Island Meet China's Long Gaze South*, Asian Affairs, 1997.

Kissinger, Henry, *Diplomacy*; New York: Simon Schuster Paperbacks, 1994.

Morgenthau, Hans J., *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: McGraw Hill, 1998.

## Artikel Online:

A. Fiddy, *Klaim China Terkait Natuna Tak Mendasar*, Okezone (online), <<http://news.okezone.com/read/2015/11/20/337/1252614/klaim-china-terkait-natuna-tak-mendasar>>, diakses pada 15 Desember 2015.

Anonim, *Tiongkok Klaim Kepulauan Natuna Miliknya, Begini Reaksi TNI, Jpan (online)*, <<http://www.jpnn.com/read/2015/11/16/338834/Tiongkok-Klaim-Kepulauan-Natuna-Miliknya.-Begini-Reaksi-TNI->>>, diakses 15 Desember 2015.

BBC Indonesia, *Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan*, BBC (online), <[http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict)>, diakses pada 15 Desember 2015.

Jakarta Greeter, *Alasan China Rebut Natuna dengan Indonesia*, Merdeka (online), <<http://jakartagreater.com/alasan-china-rebutan-natuna-dengan-indonesia/>>, diakses pada 15 Desember 2015.

M. Esty, *Yusril: Cina Bisa saja Bilang Tak Klaim Natuna, Tapi...*, Republika (online), <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/21/ny5c03335-yusril-cina-bisa-saja-bilang-tak-klaim-natuna-tapi>>, diakses pada 15 Desember 2015.

Moeldoko, *China's Dismaying New Claims in the South China Sea*, Wall Street Journal (online), <[http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304279904579515692835172248?mod=wsj\\_streaming\\_stream&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304279904579515692835172248.html?mod=wsj\\_streaming\\_stream&fpid=2,7,121,122,201,401,641,1009](http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304279904579515692835172248?mod=wsj_streaming_stream&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304279904579515692835172248.html?mod=wsj_streaming_stream&fpid=2,7,121,122,201,401,641,1009)>, diakses pada 15 Desember 2015.

W. Arkhelaus, *Cina Akui Hak Indonesia atas Kepulauan Natuna*, Tempo (online), <<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/11/21/118720925/cina-akui-hak-indonesia-atas-kepulauan-natuna>>, diakses pada 15 Desember 2015.

W. Arkhelaus, *Tegang di Natuna, Ini Senjata Luhut yang Membuat Cina Keder*, Tempo (online), <<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/11/21/118721073/tegang-di-natuna-ini-senjata-luhut-yang-bikin-cina-keder>>, diakses pada 15 Desember 2015.